



Penerbit CV Zigma Utama

Kustin Hartini, MM

**PERAN BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Urip Jaya Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

BUMDes Urip Jaya dalam menjalankan perannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu dukungan yang begitu besar dari pemerintah desa dan juga masyarakat Sumber Urip yang bisa dan mampu untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan unit usaha BUMDes. Selain itu, BUMDes Urip Jaya memiliki prospek yang sangat bagus karena Desa Sumber Urip memiliki aset yang bisa dikelola yaitu dari sumber daya alam Taman Wisata Alam Bukit Kaba sedangkan faktor kendalanya adalah dari faktor sumber daya manusia yang masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan. Hal ini disampaikan oleh kepala desa yang senada dengan penyampaian ketua BUMDesnya bahwa dari awal pendirian pengelolaan BUMDes, mereka belum mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pihak yang terkait.

Pemerintah Desa Sumber Urip dalam perannya sebagai fungsi pendampingan dalam upaya peningkatan kapasitas usaha masyarakat desa ke depannya lebih memaksimalkan setiap unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes Urip Jaya dalam rangka meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki agar dapat mendorong investasi masuk ke Desa Sumber Urip. Selain itu baik pemerintah desa maupun ketua BUMDesnya agar terus mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terutama untuk pengurus dan anggota BUMDes Urip Jaya.

PERAN BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Urip Jaya Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peran

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) **URIP JAYA**

Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat



Penerbit CV Zigma Utama

CV. Zigma Utama
Alamat Rodaksi : Jln. DP Negara V
Perum Tanjung Gemilang RT 08 RW 02
Kel. Sukarami Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu
Telp. 085369179919
email : info@zigma.co.id
penerbitzigma@gmail.com



PERAN

BUMDes

**(Badan Usaha Milik Desa) Urip Jaya
Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi
Masyarakat**

**OLEH :
Kustin Hartini, MM**

PENERBIT ZIGIE UTAMA

2021

**PERAN BUMDes
(Badan Usaha Milik Desa)
URIP JAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT**

Penulis:

Kustin Martini

Editor:

Yeti Afrida Indra

Layout :

Dodi Isran

Diterbitkan Oleh

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu **Telp. 085369179919**

ISBN 978-623-7558-81-1

Hlm.106+vi

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada
Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

Cetakan Pertama, Agustus 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan hasil penelitian ini telah dapat diselesaikan. Buku ini adalah merupakan salah satu keluaran/output dari penelitian yang dilakukan sebagai bentuk terlaksananya salah satu unsur dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kerendahan hati penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian ini.

Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku ini dapat memberikan maanfaat bagi semua pihak dari segala lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Bengkulu, September 2021
Penulis

Kustin Hartini, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TEORI	9
A. Kajian Teori	
a. Peran	10
b. BUMDes	37
B. Penelitian Terdahulu	53
C. Alur Proses Penelitian	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Data dan Sumber Data	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Keabsahan Data.....	73
F. Teknik Analisis Data	74
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 77
A. Peran BUMDes Urip Jaya Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat ...	78
B. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes.....	87
 BAB V PENUTUP	 99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	
TENTANG PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa, dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan posisi penting bagi desa untuk memainkan perannya dalam pembangunan nasional. Peran penting desa adalah kewenangan lokal yang dimiliki desa dalam pengelolaan rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.²

Desa sebagai unit terkecil dari negara yang terdekat

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

² http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, bersama masyarakat desa harus dapat bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya sehingga harapannya desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan subyek pembangunan, oleh desa, dari desa, dan untuk desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa.

Ekonomi desa adalah salah faktor yang penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Masalah ekonomi desa perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif, mulai dari pembangunan fasilitas infrastruktur hingga pengoptimalan pengembangan potensi desa sehingga menjadi peluang-peluang bisnis yang dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian

BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.³

Didalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes di atur dalam Permen ini. Dari sini terlihat bahwa potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan potensi desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa dan sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka

³ <http://www.keuangandes.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/>

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Desa Sumber Urip menjadi salah satu desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desanya melalui peran Badan Usaha Milik Desa-nya (BUMDes). Terutama setelah Dana Desa dikucurkan langsung sejak tahun 2015 dari pemerintah pusat ke desa, warga desa bisa secara independen menentukan prioritas pembangunan desanya sendiri. Dana desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, salah satunya melalui pembentukan BUMDes untuk mengelola beberapa unit usaha yang bisa menjadi sumber pemasukan bagi warga desa. Dari hasil observasi awal penelitian dengan mewawancarai pengurus BUMDes nya bahwa ada banyak manfaat positif yang diterima setelah berdirinya BUMDes di desa Sumber Urip. Namun dari beberapa unit usaha yang ada di BUMDes Urip Jaya hanya ada satu unit usaha yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli desa, sementara unit-unit usaha yang lain ikut berperan tapi tidak seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis perlu mengkaji tentang peran badan usaha milik desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana peran BUMDes Urip Jaya dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumber Urip Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran BUMDes Urip Jaya dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumber Urip Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

⁴ I Kadek Darwita, dkk, "Peranan BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng" *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 9, No.1, Tahun 2018, h. 53.

D. MANFAAT DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi seperti dosen, mahasiswa dan peneliti, dijadikan sebagai bahan acuan atau literatur untuk penelitian lanjutan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang berkenaan dengan peran BUMDes.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah Pusat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan alat ukur secara komprehensif bagi pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan yang terkait dengan peran BUMDes.

b. Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang dapat menunjang peningkatan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

c. IAIN Bengkulu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penguatan dan pengembangan kualitas akademik bagi dosen dan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II merupakan kajian teori berisi tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat terdiri dari pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tahapan pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi masyarakat tumbuh. Teori BUMDes, meliputi pengertian, tujuan BUMDes,

peran BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Bab III menyajikan metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, definisi operasional, dan teknik analisa data

Bab IV memaparkan deskripsi lokasi penelitian terdiri dari sejarah berdirinya BUMDes, visi dan misi BUMDes, struktur organisasi, dan unit-unit usaha BUMDes serta menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran BUMDes pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TEORI

A. KAJIAN TEORI

a. PERAN

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.² Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat factor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam

situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Jenis-jenis Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya. Peran (*role*) didefinisikan sebagai harapan sosial dan harapan sosial tersebut merupakan bagian dari *self*. *Self* dapat bentuk dari beberapa peran yang di mainkan oleh individu. Teori peran dapat dimengerti baik dari aspek Psikologi maupun sosial pada sifatnya. Serangkaian peran dalam

masyarakat membentuk struktur di dalamnya dimana interaksi sosial dapat terjadi secara tertib.

Dilihat dari perspektif *symbolic interaction theory*, secara jelas bahwa aspek psikologis dari *self* adalah bagian dari peran yang kompleks yang dimainkan dalam hidup. Perilaku kita ada pertimbangan dari konteks tertentu tentang apa yang kita harapkan dalam situasi tertentu. Peran yang dimainkan oleh orang lain dalam kehidupan dimasa lalu (masa kecil) merupakan bagian dari pengalaman kita yang sulit untuk diubah di usia dewasa. Hal ini memungkinkan untuk memahami dan melakukan intervensi secara menyeluruh terhadap kesulitan yang dihadapi seseorang dengan memahami peran yang dimainkan oleh orang yang bersangkutan, harapan terhadap peran tersebut dan jaringan orang lain dengan siapa orang tersebut berinteraksi dalam melakukan peran sosial. (Dale, et al, 2006)

a) Kelompok Reference

Ketika seseorang menampilkan peran sosial, dia melakukan perilaku dengan sebuah pemikiran dari pihak lain. Seluruh perilaku di kendalikan oleh harapan orang lain. Proses ini disebut dengan referensi. Hanya, makna ini ketikakita melakukan tindakan. Kita merujuk seseorang untuk menyetujui atau mencela perilakunya. Orang yang kita rujuk tersebut bisa nyata, imajiner atau sebuah generalisasi dari yang lain. Bentuk sosial kita memungkinkan untuk mengerti perilaku peran tanpa memperdulikan orang lain yang berpendapat tentang perilaku yang kita lakukan. Orang lain yang menilai perilaku kita tersebut dinamakan *significant others*. Kita percaya bahwa konselor memahami kliennya, adalah penting untuk menentukan evaluasi diri dari si klien tersebut.

b) Pekerjaan dan Keluarga

Pentingnya mempelajari peran dalam keluarga telah jelas. Keluarga disebutjuga sebagai *Primary Group*. Bagi sebagian besar kita, keluarga adalah titik sentral dalam pengembangan rasa kita terhadap orang lain dan

meningkatkan nilai-nilai kita yang abadi. kita sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di keluarga dahulu. Peran keluarga berkembang terus-menerus dan memberikan dasar terhadap diri (*self*) dan setiap bagian dari *self* tersebut. Area pekerjaan kehidupan sering terlupakan adalah gambaran yang jelas dalam teori peran. Banyak teori tentang perilaku manusia mengalami kesulitan untuk menjelaskan transisi dari *primary group* seperti keluarga ke *secondary group* seperti sekolah maupun dunia kerja. Teori peran memberikan struktur petayang baik untuk mengukur perilaku fungsional maupun perilaku disfungsional dalam dunia kerja. Sedikit teori yang memberikan sebuah penjelasan perilaku dan perbaikan perilaku seperti yang ada di teori peran (Stephen & Stephan, 1985).

Teori peran dan interaksi simbolik memberikan suasana untuk membahas sebuah konsep yang mengganggu: perilaku normal. Seperti halnya dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. Konsep normal telah jatuh (tidak disetujui). Dalam sejarah kita telah terkenal dengan “*tyranny of normality*” yaitu hukuman terhadap perilaku yang tidak patuh. Meskipun demikian seluruh sistem sosial membutuhkan kesepakatan dalam perilaku yang semestinya. Dalam diskusi tentang perbedaan, kita akan mengarahkan kepada masalah yang terjadi pada individu dan masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan.

Teori peran menyempurnakan tiga hal yang penting untuk praktisi (konselor, psikolog dan pekerja sosial). Pertama: definisikan struktur dan kontek perilaku dalam range situasi yang luas. Hal ini memaksa kita melihat secara spesifik tentang peran yang dimainkan, *significant others*, harapan peran dan akibat dari perilaku yang gagal. Kedua: Terdapat perbedaan antara perilaku dan orang (pelaku) serta asumsi bahwa perilaku bermasalah dapat diulang. Ketiga: hal ini memaksa kita untuk berhati-hati menilai diri tentang harapan kita, nilai dan asumsi. Teori peran mengingatkan pada kita bahwa semua perilaku bisa terjadi dalam sebuah suasana sosial

dan tidak ada istilah perilaku salah atau benar. Relativitas pendekatan ini secara khusus disamakan dengan pencarian untuk mendapatkan pemahaman tanpa melakukan penilaian (mencari benar salah) (Dale, et al, 2006)

Teori peran memusatkan kepada apa yang harus orang lakukan. Teori peran ini mengadopsi dari drama. Peran didasarkan pada ekspektasi yang tertuang dalam aturan atau norma. Norma ibarat naskah dalam drama yang harus dimainkan oleh sang aktor. Individu dalam relita kehidupan adalah aktor yang memainkan peran tersebut, dan panggung dramanya adalah kelompok, atau masyarakat.

2. Proposisi Teori Peran

Berikut ini proposisi sentral dari dari perspektif teori peran (Michener & DeLamater, 1999) :

1. Orang akan banyak menghabiskan bagian hidup mereka dengan berpartisipasi sebagai anggota kelompok.
2. Dalam kelompok mereka, individu menduduki posisi yang berbeda-beda (seperti, polisi, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga dan lain-lain)
3. Pada masing-masing posisi menuntut adanya sebuah peran, yang merupakan seperangkat fungsi dari kemampuan yang dituntut dari seseorang oleh kelompoknya. Peran individu dianggap sebagai harapan (hal ini dipegang oleh anggota kelompok yang lain) yang spesifik tentang bagaimana seharusnya individu harus menampilkan diri
4. Kelompok sering memformalisasi harapan tersebut menjadi norma, berupa bagaimana seharusnya yang harus dilakukan oleh seseorang, hadiah apa yang akan diberikan jika dia mampu mencapainya dan hukuman apa jika dia gagal mencapai harapan tersebut.
5. Individu biasanya membawa peran mereka dan mencocokkan penampilan mereka dengan norma, atau dengan kata lain individu akan konformis

(mengikuti aturan) mereka mencoba mempertemukan harapan orang lain.

6. Anggota kelompok akan mengecek masing-masing penampilan individu untuk menentukan apakah mereka tunduk pada norma, jika individu berhasil mempertemukan peran yang diharapkan oleh orang lain, maka individu tersebut akan memperoleh *reward* (bisa berupa penerimaan, persetujuan, uang dan lain-lain). Jika individu gagal menampilkan penampilan seperti apa yang diharapkan oleh anggota yang lain, maka dia dianggap memalukan dan akan terkena hukuman, bahwa akan dikeluarkan dari kelompok. Sebagai antisipasi agar tidak dilakukan oleh anggota kelompok yang lain.

3. Pengaruh Peran

Teori peran mengimplikasikan bahwa jika kita (sebagai analis) mempunyai informasi tentang harapan peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksikan secara tepat perilaku orang yang menduduki posisi tersebut. Menurut teori peran perubahan perilaku menuntut perubahan atau peninjauan ulang dari peran orang tersebut. Hal ini mungkin dilakukan dengan merubah peran yang diharapkan oleh orang lain atau merubah peran seseorang ke dalam peran yang berbeda secara total.

Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh perilaku, juga ditentukan oleh kepercayaan (*Belief*) dan sikap (*attitude*). Dengan kata lain individu membawa sikap mereka yang selaras dengan harapan yang didefinisikan oleh peran mereka. Sebuah perubahan dalam peran akan mengakibatkan perubahan sikap.

Secara umum peran yang diperang oleh seseorang tidak hanya berhubungan pada perilaku mereka tetapi juga membentuk sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai (*value*) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadian mereka.

Teori peran khususnya mengacu pada aktor dan

norma kadang-kadang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (*self*). Demikian juga dengan kenyataan bahwa kita memainkan peran orang lain bukan berarti hal ini dibuat-buat atau tidak wajar.

Peran mempunyai beberapa karakter (Stephen & Stephan, 1985); 1) peran dimainkan oleh individu; 2). Peran adalah perilaku, apa yang dilakukan orang dalam peran tersebut dapat dilihat dan peran membentuk karakter orang yang memainkannya; 3). Peran dibatasi oleh ruang dan waktu. Satu orang mempunyai beberapa peran dalam kehidupannya dan memainkannya sehari-hari dan beberapa peran muncul secara berderet-deret.

Dalam peran terkandung harapan peran. Harapan peran ini merupakan konsep masyarakat terhadap apa yang akan dilakukan oleh individu. Salah satu alasan bahwa harapan peran penting adalah individu cenderung mengevaluasi secara positif keberadaan perilaku peran mereka sesuai dengan harapan peran. Jika seseorang tidak sesuai dengan harapan peran, hal ini menunjukkan bahwa individu mungkin kurang mempunyai kemampuan untuk memainkan peran atau kurang mempunyai keterlibatan dalam peran. Harapan peran mempunyai berbagai dimensi (Dale, et al, 2006):

1. Harapan peran bervariasi dalam generalisasi dan kekhususannya. Untuk beberapa peran seperti peran sebagai ayah, individu mempunyai ruang gerak yang luas dalam berperilaku dalam menjalankan perannya. Berbeda dengan peran yang lain dalam militer yang mempunyai peran yang khusus dan telah ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan
2. Harapan sosial bervariasi dalam keluasannya. Beberapa peran seperti peran jenis (harapan terhadap bagaimana perempuan dan laki-laki berperilaku) mempengaruhi banyak perilaku kita, dan menentukan peran-peran yang lain yang ada dalam diri kita. Berbeda dengan peran sebagai penjaga toko yang pengaruhnya tidak signifikan

terhadap hidup kita.

3. Harapan sosial berbeda dalam kejelasan dan kesamarannya. Peran sebagai mahasiswa lebih jelas, daripada peran sebagai pengasuh anak. Seorang mahasiswa mempunyai kewajiban datang kuliah, belajar, meneliti dan harus bisa menjawab soal ujian.
4. Harapan sosial mempunyai perbedaan dalam tingkat konsensusnya.

Linton (Stephan & Stephan, 1985) membagi dua tipe peran

- 1) *Ascribed Role* yaitu peran yang ada sejak dia dilahirkan tanpa ada usaha untuk mencapainya seperti jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga.
- 2) *Achieved role* yaitu peran yang ada pada individu karena dia mencapai hasil prestasi. Peran seperti ini memerlukan ketrampilan dan pelatihan. Contohnya adalah peran dalam dunia kerja.

Ada yang berbeda antara yang dikemukakan oleh Lipton yang menyatakan bahwa sebagian peran seseorang berasal dari lahir tanpa harus berusaha mencapainya, dengan apa yang dikemukakan oleh Mead bahwa peran adalah harapan sosial.

4. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya.
- b) Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdarakan kemandirian lokal.
- c) Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan

yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.⁵ Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Pusat dari seluruh proses pembangunan desentralisasi adalah Desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional

5. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan(*empowerment*). berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987).
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).

Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan

prinsip- prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1 Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
- 2 Organisasi masyarakat bawah, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3 Keragaman budaya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal;
- 4 Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya;
- 5 Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
- 6 Demokrasi dalam penerapan ilmu, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan;
- 7 Belajar sambil bekerja, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;
- 8 Penggunaan metoda yang sesuai, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya);
- 9 Kepemimpinan, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
- 10 Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh;
- 11 Segenap keluarga, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial;
- 12 Kepuasan, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat

menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

6. Ekonomi Kerakyatan

a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir,1989), bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru, tetapi sekedar percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan, ekonomi kerakyatan bagi Emil - Salim (Swasono,1985), yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawarjasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. sebagian terbesar berada di perdesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah.

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993)

Ekonomi Kerakyatan berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya interpretasi dari pembangunan masyarakat adil dan makmur yang meletakkan masyarakat sebagai satu kesatuan pemegang peranan sentral dalam sistem ekonomi.

Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan adalah:

- a) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis sosial dan moral
- b) Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “*egaliterism*” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan
- c) Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi
- d) Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat, dan
- e) Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial.

b. Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan juga memiliki lima sasaran pokok yang ingin diraih, yaitu:

- a) Tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat
- b) Jaminan sosial terselenggara bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin
- c) Kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat
- d) Pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali
- e) Setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya.

c. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan Ekonomi Kerakyatan di antaranya:

- a) Membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi negara

c) Menaikkan pendapatan masyarakat secara merata

7. Pertumbuhan Ekonomi

Makna pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang sering diidentikan dengan upaya kenaikan pendapatan per kapita. Seperti definisi pertumbuhan ekonomi yang selalu dikemukakan yaitu merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Jhingan (2004:7-8), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber – sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.⁵

Teori pertumbuhan secara umum terbagi dalam tiga kelompok pendekatan adalah sebagai berikut:⁶

a) Teori Pertumbuhan Klasik

1) Teori Adam Smith

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk.

2) Teori David Ricardo

Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo mengatakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada

⁵ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2012), h. 113

⁶ Rudi Badrudin, *Ekonomika.....* h. 118-141

laju pertumbuhan *output* dan laju pertumbuhan penduduk.

3) Teori Solow Swan

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor – faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

4) Teori Joseph Schumpete

Teori Joseph Schumpeter ini menjelaskan tentang perkembangan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan *output* total masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

5) Teori Artur Lewis

Teori pertumbuhan ekonomi Artur Lewis ini membahas tentang proses transformasi industrialisasi pada tahap awal pembangunan kapitalis di Eropa dengan melihat hubungan antara sektor pertanian (tradisional) dan industri (modern) memasuki proses dalam perekonomian yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan dengan memasuki proses urbanisasi yang terjadi di daerah tersebut.

b) Teori Pertumbuhan Modern

1) Teori Wal Witman Rostow

Menurut teori ini, proses pertumbuhan dan pembangunan dibedakan dalam 5 tahap yaitu : Masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi.

2) Teori Simon Kuznets

Teori Simon Kuznets ini, mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.

- 3) Teori Friederich List
Menurut Friederich List perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi dan hanya terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terdapat kebebasan perorangan dan kebebasan dalam berorganisasi politik.
- 4) Teori Bruno Hilderbrand
Menurut Bruno Hilderbrand perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi yang digunakan meliputi tahap perekonomian barter (natura), tahap perekonomian uang, perekonomian kredit.
- 5) Teori Karl Bucher
Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi meliputi tahap produksi untuk kebutuhan sendiri (*subsisten*), tahap perekonomian kota.

c) Teori Ketergantungan.

Dalam teori ketergantungan ini ada dua aliran yaitu aliran Marxis-Neo Marxis dan aliran Non-Marxis. Aliran yang pertama menggunakan kerangka teori imperialisme yang tidak membedakan secara tajam antara struktur internal dan eksternal, karena kedua struktur tersebut dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Selain itu, aliran ini mengambil perspektif perjuangan internasional antara pemilik modal dengan kaum buruh. Oleh karena itu, menurut teori ini, pembangunan ekonomi untuk daerah pinggiran adalah dengan cara melakukan revolusi. Sedangkan aliran kedua melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Di mana aliran ini dengan tegas membedakan keadaan di dalam negeri dan luar negeri.

d) Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Ciri-ciri Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP) dari tahun ke tahun (jangka pendek)

2. Kenaikan jumlah barang dan jasa
3. Ditemukannya sumber-sumber produktif yang dapat didaya gunakan.

Prof. Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dll. Ke enam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal dan manusia di berbagai negara. Dari keenam ciri-ciri tersebut dua diantaranya ada adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk. Keduanya berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional.⁷

Berikut ciri-ciri pertumbuhan penduduk:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita
Pertumbuhan ekonomi modern yang sebagaimana terlihat dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi. Di mana itu dibarengi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali untuk produksi. Prof. Kuznets menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di 13 negara tidak termasuk Prancis pada masa modern adalah lebih tinggi daripada masa pra-modern. Kecuali Prancis yang pertumbuhan penduduknya sebesar 2,5 persen per dasawarsa. Laju pertumbuhan penduduk bergerak di sekitar 6 hingga 7 persen untuk Inggris, Swedia, Jerman Barat, Jepang, dan Belanda. Untuk 19-24 persen Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.

⁷ <https://www.kompas.com>

- 2) Peningkatan produktivitas
Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin besarnya efisiensi atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju.
- 3) Laju perubahan struktural yang tinggi
Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa. Kemudian perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum serta perubahan status kerja buruh.
- 4) Urbanisasi
Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Pengertian dan Elemen Pentingnya Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha nonagraris sebagai hasil perubahan teknologi yang menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan.
- 5) Ekspansi negara maju
Pertumbuhan pada negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa yang lain. Hal itu sebagian besar disebabkan perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu ketika ilmu dan pengetahuan modern mulai berkembang.

- 6) Arus barang, modal, orang antarbangsa
Arus barang, modal, dan orang antarbangsa semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Tapi mulai mundur pada Perang Dunia I dan berlanjut hingga akhir Perang Dunia II. Namun sejak awal tahun 1950 an terjadi peningkatan dalam arus barang, modal, dan antarbangsa

e) Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan (2004), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, yang pertumbuhannya tergantung pada:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan salah satu faktor atau indikator dari pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Factor ini mampu mempercepat sekaligus memperlambat proses laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya: suatu Negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi maka Negara yang tengah mengalami kemunduran.
2. Faktor Sumber Daya Alam (SDA), Negara Indonesia termasuk Negara yang kaya akan SDA, namun sayang tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang baik untuk mengelolanya. Sehingga, Indonesia tak jarang mengekspor SDA mentahnyakemudian mengimpornya kembali ketika barang telah jadi dengan harga yang lebih mahal. Dengan adanya keterbatasan pengelolaan SDA membuat berbagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengelolaan bahan mentah diharuskan mengimpor bahan dasar dari luar negeri. Sehingga hal tersebut menyebabkan produk perusahaan akan jauh lebih mahal dibandingkan saat harus memperolehnya dari dalam negeri.
3. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebuah Negara dapat dikatakan maju dalam ekonominya apabila Negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tanpa kecuali dalam suatu perusahaan yang lebih mengedepankan penggunaan teknologi dalam produksi

barang dan jasa supaya lebih efisien. Pemakaian teknologi yang maju telah mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut mampu dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien.

4. Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, hal ini meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Adam smith menekankan arti penting adanya pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Jika skalaproduksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, lajupertumbuhan ekonomi akan melesat.
5. Sumber Daya Modal, adalah barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau memproduksi suatu barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

f) Tahap - Tahab Pertumbuhan Ekonomi

Ada lima tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Masyarakat Tradisional
Masyarakat tradisional diartikan sebagai “suatu masyarakat yang strukturnya berkembang disepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-newton dan sebagai hasil pandangan pra- newton terhadap dunia fisikal”.
- 2) Prasyarat Tinggal Landas
Tahap ini merupakan masa tradisi dimana parasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan.

⁸ Jhiang, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142

- 3) Tinggal Landas
Tahap ini merupakan titik yang menentukan didalam kehidupan suatu masyarakat “ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat-istiadat dan lembaga-lembaga.
- 4) Era Konsumsi Massa Besar-besaran
Abad konsumsi masa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang konsumsi dan peratan rumah tangga yang tahan lama.

g) Indikator Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Suatu daerah dikatakan maju atau tidak ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dan Kemajuan suatu Daerah dapat dilihat dari parameter-parameter berikut:⁹

- 1) Pendapatan Per Kapita
- 2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
- 3) Kegiatan Perekonomian Utama
- 4) Ketersediaan Modal
- 5) Pemanfaatan SDA
- 6) Pertumbuhan Penduduk
- 7) Kepadatan Penduduk
- 8) Tingkat Pengangguran
- 9) Keadaan Sosial Budaya
- 10) Kemajuan Teknologi

h) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketahui apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi.

⁹ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
h. 56-63

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan, Sumber Daya Alam non Hayati (sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam), Sumber Daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali (Contoh sumber daya aini diantaranya Hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama (Minyak bumi, batu bara, dan gas alam), Terakhir sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis (Contoh sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber Daya Manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong Sumber Daya

Manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

- a. Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) : Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya memberikan motivasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu hal yang wajib dilakukan.
- b. Sesuaikan Pekerjaan dengan Kemampuan dan Minat Sumber Daya Manusia (SDM) : Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya terhadap sesuatu.
- c. Program Pelatihan : Memberikan program pelatihan kepada para Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Perpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal.
- d. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkala: Dalam mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam periode yang ditentukan, diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki.

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal.

Kaitan antara Akumulasi Modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam

membangun perekonomiannya. Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), modal, hingga faktor produksi lainnya.

6. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi.

Selain itu Aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, Tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Karenanya hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib.

i) Metode Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam focus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai

pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu indikator lainnya adalah pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Tak hanya itu kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebab terkait pendapatan riil per kapita. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat ekonomi ke arah yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Tersedianya lapangan kerja kemudian akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga secara otomatis, saat hal ini terjadilah pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara terjadi. Artinya, produktivitas meningkat.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

1) Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun, dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam *Gross National Product* (GNP), sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam *Gross National Product* (GNP). Pendapatan yang termasuk dalam *Gross National Product* (GNP) juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang

akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau *Gross National Product* (GNP) adalah dengan cara membandingkan *Gross National Product* (GNP) di periode ini dengan *Gross National Product* (GNP) pada periode sebelumnya.

Misalnya jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 maka harus mengetahui berapa jumlah *Gross National Product* (GNP) yang didapat Indonesia di tahun 2020 dan *Gross National Product* (GNP) pada tahun 2019. Berikut ini visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan PDB atau GNP:

Keterangan:

R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu Negara

GNP : GNP suatu Negara

GNPy-1: GNP/PNB suatu negara pada tahun sebelumnya

2) Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Jika Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP). Meski demikian pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke hitungan GDP. Rumus menghitung pertumbuhan ekonominya pun hampir sama dengan menggunakan *Gross National Product* (GNP) dimana dilihat perbandingan antara *Gross Domestic Product* (GDP) di periode tersebut terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di periode sebelumnya.

Misalnya ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka perlu memiliki data *Gross*

Domestic Product (GDP) di tahun 2020 dan *Gross Domestic Product* (GDP) di tahun 2019. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara:

Keterangan:

R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara

GDP : GDP suatu negara

GDPy-1: GDP/PDB suatu negara pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara, yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

b. BUMDes

a) Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengertian ini menurut Maryunani (2008) juga memberi makna bahwa BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan. Selanjutnya Maryunani (2008) menjelaskan bahwa ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui

¹⁰ Nurdianti R, dkk, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur, *Elastisitas, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 3. No. 1, Maret 2021.

- b. penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- d. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
- e. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- f. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial di desa.
- g. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
- h. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- i. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
- j. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- k. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai lembaga ekonomi guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 atau dikenal dengan UU Desa yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDesa. Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Bab 2 dan 3, pendirian BUMDesa bertujuan :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa

- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

b) Dasar Hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:¹¹

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
Pasal 78
 - a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam

¹¹ Kadar Nurzaman, dkk, *Manajemen...*, hlm. 135.

Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - 1. Pemerintah Desa;
 - 2. Tabungan masyarakat;
 - 3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 4. Pinjaman; dan/atau
 - 5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - 6. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan proposal badan usaha milik desa diatur dengan peraturan daerah Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk Badan Hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak Dan Kewajiban
 - d. Permodalan
 - e. Bagi Hasil Usaha Atau Keuntungan
 - f. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 - g. Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban.

Peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, diwujudkan dengan adanya pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Konsep

pengelolaan BUMDes sesuai tujuan nasional prinsip keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan konsep sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

c) Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional
- c. Pengawas

Dalam pembentukan kepengurusan BUMDes dapat dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat desa. Sesuai dengan yang telah diamatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersefiskan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan Masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:¹²

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat

¹² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: MitraWacana Media 2004),

dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif

- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dandilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

d) Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

a. BUMDes *Banking*

BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

b. BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.

c. BUMDes *Brokering*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak Desayang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

d. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama desa-desa yang ada dipulau jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekakas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin mollen.

e. BUMDes *Trading*

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan masyarakat.

e) Pendapatan Masyarakat

Pengertian pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku. Pendapatan juga merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghimpunan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, definisi pendapatan merupakan seluruh hasil yang diperoleh atau diterima oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok yang merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang dimiliki, seperti berupa gaji, bunga, modal, dan lain sebagainya yang merupakan hasil proses produksi selama jangka waktu tertentu.

Indikator Tingkat Pendapatan.

Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang diikutsertakan terdiri dari modal, atau keterampilan. Oleh sebab itu, dengan mempunyai produktivitas tenaga kerja yang tinggi pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih besar. Adapun indikator tingkat pendapatan antara lain:

a. Upah dan Sewa

Pendapatan rumah tangga ditentukan oleh tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga

kerja nilai sewa tanah sebagai penerimaan dari penguasaan asset produktiflahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat faktor produksi.

b. Keuntungan

Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dengan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Jika hasil penjualan tinggi maka pendapatan akan meningkat.

c. Keahlian

Keahlian adalah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang dipercayainya. Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi pula, maka gaji atau upah yang didapatkan semakin tinggi.

d. Bobot latihan

Seseorang yang mempunyai bobot lebih tinggi maupun kursus tertulis, bisa juga dari pengetahuan dan pengalaman seseorang. Bobot latihan memperbesar pendapatan karena latihan itu meningkatkan keterampilan seseorang sehingga ia mampu menghasilkan produk fisik marginal yang lebih tinggi.

Sumber Pendapatan Rumah Tangga

Menurut stoner dan wilson ada tiga sumber pendapatan rumah tangga yakni:

1. Pendapatan dari Gaji dan Upah

Merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin, pengawas, pegawai tata usaha, pegawai kantor serta para manajer lainnya. Proses pembayaran gaji biasanya diberikan dalam setiap bulannya, gaji biasanya tingkatannya lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan.

2. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang dapat menghasilkan pendapatan atas balas jasa penggunaan, ada dua

kelompok aset produk. pertama, aset keuangan seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham, yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan keuangan seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai atas balas jasa atau input yang diberikan. Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, pembayaran untuk jaminan sosial yang diambil dari pajak yang tidak menyebabkan pertambahan dalam output.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan

Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yakni antara lain:

- a. Upah/ gaji, pendapatan ini merupakan ganjaran dari pendapatan tenaga kerja yang bekerja dalam perekonomian
- b. Laba/ keuntungan, pendapatan yang berasal dari hasil sewagedung/bangunan.
- c. Nilai tambah, pertambahan nilai uang dari suatu barang yang diwujudkan oleh setiap perusahaan dalam perekonomian
- d. Pendapatan usaha sendiri, pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang/rumah tangga dari hasil usaha yang dilakukannya.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk menjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

j) Peran BUMDes Terhadap Peningkatan ekonomi Masyarakat

Peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut dalam hal ini peranan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

k) Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes.

BUMDes dalam melaksanakan perannya untuk mencapai tujuan yang efektif, ada berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi dibangun dari interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau dan mampu melibatkan diri untuk bersosialisasi dengan individu lainnya. Dalam strategi pengembangan BUMDes yang baik, tidak hanya menyangkutkan pengurus BUMDes saja tetapi juga ada hubungan dengan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan kritik atau sarannya kepada pengurus BUMDes. Dengan begitu pengurus pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan masyarakat, atau terkait masalah dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kritik dan saran atau berbagai pendapat yang ditampung oleh pengurus lalu disampaikan pada saat rapat. Hal inilah yang nantinya akan membawa pengurus BUMDes pada sebuah perubahan, dimana akan dilakukan perbaikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan pembenahan. Dari adanya partisipasi masyarakat yang berupa penyampaian kritik/saran juga termasuk pada tindakan proaktif. Inti utama dari perilaku proaktif ini yaitu individu memiliki tindakan aktif dan kreatif. .

b. *Education and Training Activities* dalam Kegiatan Pengembangan BUMDes

Sebuah organisasi sangat memerlukan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. *Education and Training Activities* merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain.

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di BUMDes, pendidikan dan pelatihan tidak hanya diutamakan kepada Ketua BUMDes, tetapi juga untuk pengurus BUMDes lainnya. Selain itu pendampingan oleh para konsultan yang berkompeten juga dibutuhkan saat awal BUMDes didirikan. Proses pendampingan disini digambarkan sebagai bentuk pendidikan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes diajarkan berbagai cara pengelolaan BUMDes yang baik dan benar sesuai dengan aturan dasar BUMDes. Selain itu juga ada pendampingan mengenai aplikasi program, yang berguna untuk pengerjaan laporan tahunan.

l) Sosialisasi untuk Masyarakat

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai BUMDes dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Sosialisasi dapat diberikan pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUMDes saja tetapi juga pada saat BUMDes telah berjalan. Hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

m) Team Building yang Solid

Team building sangatlah penting dalam sebuah proses pengembangan organisasi. *Team building* merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Strategi dalam pembentukan tim ini dirasa sangat diperlukan karena tim inilah yang nantinya akan menjalankan semua urusan atau pengelolaan organisasi, sehingga setiap pengurus

harus memiliki kompetensi dalam dirinya. Dalam strategi pembentukan tim yang ada di BUMDes, alangkah lebih baik jika lebih mementingkan pembentukan yang seluruh pemilihannya diserahkan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan BUMDes ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat, sehingga semua keputusan juga dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, proses pemilihan pengurus yang dilakukan oleh masyarakat harus didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki kandidat, dimana setiap pengurus harus berkompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung yang bisa mempengaruhi perkembangan BUMDes dalam mencapai tujuan yang efektif, ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kerancuan Posisi BUMDes sebagai Institusi Sosial dan Komersial

Keleluasaan jenis usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes terlihat jelas di Undang-Undang Tentang BUMDes Nomor 6 Tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Pemahaman terhadap BUMDes yang harus menghasilkan profit akan mengerahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes.

Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan institusi komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam

melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

b. Rendahnya Inisiatif Internal Masyarakat dalam Menggerakkan Ekonomi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksikan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self-governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Desa juga tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa, namun meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Konstruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah.

Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam studi ditemukan inisiatif pembentukan lebih banyak muncul dari pihak luar desa. Walaupun ada juga inisiatif yang hadir dari internal desa (pemerintah desa dan masyarakat), namun masih minim. Menjadi penting dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlampauinya target pembentukan BUMDes harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

c. Kebijakan yang Belum Mengarahkan Profesionalisme BUMDes

Struktur pengelolaan BUMDes masih banyak yang belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Hasil itu dapat dilihat dengan masih ada pengelola operasional BUMDes yang dijabat oleh aparatur Pemerintahan Desa. Selain itu, tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes.

Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa. Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes. Kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari beberapa poin diatas, dipandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes, sehingga akan memperkuat pengelolaan BUMDes secara umum. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes Masih Kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi

karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai yang bisa mengakibatkan adanya isu BUMDes yang hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

e. Kepemimpinan dan Manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah Desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUMDes.

BUMDes merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat. Namun, jika suatu BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kemampuan para

direksi BUMDes. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Akibatnya, BUMDes tidak melaju cepat dan hanya jalan di tempat.

f. Konsep Pembangunan Desa yang Keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Versanudi Hekmatyar dan Fentiny Nugroho dengan judul "*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro*". Dengan tujuan untuk mendiskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pembangunan sosial dengan mengambil studi kasus di Desa Kedungprimpen. Hasil penelitiannya menunjukkan, Pertama BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial. Kedua, BUMDes memiliki peran penting dalam pengelolaan irigasidan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian. Ketiga, BUMDes memiliki tanggung jawab terhadap pembagian hasil usaha pengolahan irigasi kepada lapisan terbawah masyarakat Desa Kedungprimpen. Terakhir, BUMDes di Desa Kedungprimpen memiliki potensi yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDes dapat digunakan sebagai strategi

peningkatan kualitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan penduduk di Desa Kedungprimen.¹³

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S dengan judul penelitian “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran modal sosial BUMDes dan strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengembangan BUMDes manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.¹⁴

Penelitian selanjutnya yang digunakan sebagai rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Angraeni dengan judul “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMdes Di Gunung Kidul*” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan BUMDes pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan

¹³ Versanudin Hekmatyar, Fentiny Nugroho, Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro, Sosio Konsepsia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 7. No 2 2018

¹⁴ Dewi Kirowati, dkk, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol. 1, Edisi 1, 2018, h. 15.

pekerjaan di BUMDes.¹⁵ Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdianti R dan Hailuddin dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana dan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Labuhan Haji memiliki beberapa unit usaha, seperti usaha simpan pinjam, produksi batako serta unit penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Unit usaha tersebut, berjalan relative cukup baik hingga saat ini, meskipun terkadang terasa agak lambat. Namun secara agregat kegiatan BUMDes ini belum banyak menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat setempat, karena memang kiperahnya masih sangat terbatas untuk bisa menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kendala utama dalam menjalankan unit usaha BUMDes ini adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes, disamping dari aspek manajemen yang dirasa masih belum maksimal dilakukan oleh pengelolanya. Ada persamaan dari kedua penelitian ini bahwa keberadaan BUMDes belum secara signifikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian Samadi, Arrafiqur rahman, dkk dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) Penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat, khususnya masyarakat pengguna

¹⁵ Maria Rosa Ratna, “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta”, MODUS, Vol.28, 2016, h. 155.

¹⁶ Nurdianti R, dkk, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur, Elastisitas, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 3. No. 1, Maret 2021

dana BUMDes di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu dan hasil penelitiannya adalah bahwa peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.¹⁷ Elma Lazuardiah, Dkk Meneliti Tentang *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa* Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur Yang Tujuan Penelitiannya Adalah Untuk Mengetahui Peran Bumdes Dalam Mendayagunakan Potensi Ekonomi Lokal Dengan Beragam Potensi Yang Dimiliki Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Serta Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Penelitian Ini Yang Dilakukan Bersifat Lapangan Dengan Hasil Penelitian Adalah Bahwa Peran Bumdes Sumber Sejahtera Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pujonkidul Melalui Program Dan Unit Usahanya Dapat Membuka Lapangan Pekerjaan Baru Untuk Warga, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Serta Mendorong Peningkatan Pad Desa.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Firdaus dengan judul *Peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa manding laok kec.manding kab.sumenep* memiliki tujuan untuk mencari tahu peran bumdes dalam membangun perekonomian masyarakat desa manding laok kecamatan manding kabupaten sumenep serta untuk mencari tahu faktor pendukung dan penghambat bumdes dalam menjalankan roda perekonomian di desa manding laok

¹⁷ <https://www.neliti.com/id/publications/110259/peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-dalam-peningkatan-ekonomi-masyarakat>.

¹⁸ Elma Lazuardiah, Dkk, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa* Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. <http://journal.febubhara-sby.org/bharanomic> Vol.1 No. 1 tahun 2020

kecamatan manding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bumdes dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya, dengan berkembangnya bumdes meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa dan salah satu yang menjadi penghambat pada perkembangan bumdesnya adalah pada aspek sumber manusia.¹⁹

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Dantika dan Yanuardi yang berjudul “Dampak BUMDes bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”, bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa, Pengelola BUMDES, dan beberapa masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Guna menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakan reduksi data, *display data*, dan verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES.

¹⁹ Raudhatul Firdaus, *Peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa manding laok kec.manding kab.sumenep*, JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), Vol. 1 No. 7 Desember 2020

Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samadi dkk dengan judul penelitiannya adalah: “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat, khususnya masyarakat pengguna dana BUMDes di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian adalah sebagian dari pengguna dana BUMDes Desa Pekan Tebih tahun 2013 sebanyak 277 orang dan penentuan sampel menggunakan metode Proposional sehingga sampel penelitiannya berjumlah 42 orang. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, hanya menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya. Untuk itu penulis menyarankan kepada pengguna dana BUMDes harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil dari usahanya, dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang diperoleh. Bagi pihak BUMDes harus kontroling dan sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengguna dana BUMDes tersebut.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh I wayan Suwendra dan I Nyoman Sujana adalah untuk mengetahui peranan BUMDes Eka Giri Karya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambatnya. Adapun manfaat penelitian yaitu memberi tambahan pengetahuan bagaimana peranan BUMDes dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Penelitian ini

dilakukan pada BUMdes di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kab.Buleleng.BUMDes yang berdiri sejak Tahun 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sampel kecil, tidak representatif, purposive (snowball), dan berkembang selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menuturkan dan menganalisa dengan panjang lebar, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis data dan interpretasi data. Hasil dari pengamatan (Observasi) dan wawancara di lapangan kemudian diolah dengan menyusun dalam bentuk uraian yang lengkap, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta berkaitan dengan masalah sehingga data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa peranan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha pertanian atau perkebunan melalui kegiatan simpan pinjam demikian juga dengan peningkatan pendapat kelompok subak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz prasetyo (2016), dan Hibrahim (2019) yang mengatakan bahwa Keberadaan BUMdes secara ekonomi dapat meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Namun demikian dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dari pada BUMDEs dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Faktor Ekonomi dan Non Ekonomi, hal ini sejalan dengan pendapat, Ibrahim (2019) yang mengatakan bahwa faktor penghambat adalah Anggaran yang dimiliki oleh BUMdes dan faktor pendukung dimiliki Sumber Daya Alam yang memadai.²⁰

Penelitian yang di lakukan oleh Coristyan Berlian bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan badan usaha milik desa di Desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak

²⁰ Seminar Nasional Riset Inovatif, hal 393, 2020

dibidang sosial dan ekonomi begitu juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa meliputi pembentukan badan usaha milik desa, mekanisme, bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalan (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa meliputi sumber sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri (3) faktor penghambat dan pendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi keberadaannya tidak membantu dalam pemasukan pendapatan desa. Kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa kepada desa tidak ada, karena semua bidang usaha yang dulunya ada untuk saat ini tidak berjalan. Sehingga yang seharusnya bidang usaha tersebut dapat menyokong pendapatan desa, justru tidak dapat memberikan kontribusi. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifa Rachmanda Filya dengan judul *“Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”*. Dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desa yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun sering ditemukan tujuan tersebut belum terpenuhi karena

antara pendapatan dan kontribusi yang diberikan tidak signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADes. BUMDes Guyub Reksa Dana milik Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro merupakan salah satu BUMDes yang perlu dilakukan optimalisasi karena setelah mengalami mati suri dan kembali beroperasi selama 2 tahun terakhir kontribusi yang diberikan ke dalam PADes hanya 10 juta per tahun. Angka tersebut tidak mencapai 10% dari total Pendapatan Asli Desa Sukorejo. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sukorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Saran yang diberikan peneliti yaitu: (1) Dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap dimensi dan indikator yang belum terpenuhi, (2) Menarik minat masyarakat terhadap BUMDes dengan membuat acara dan (3) Pemerintah Desa melakukan pendampingan intensif terhadap BUMDes agar memacu pendapatan.²¹

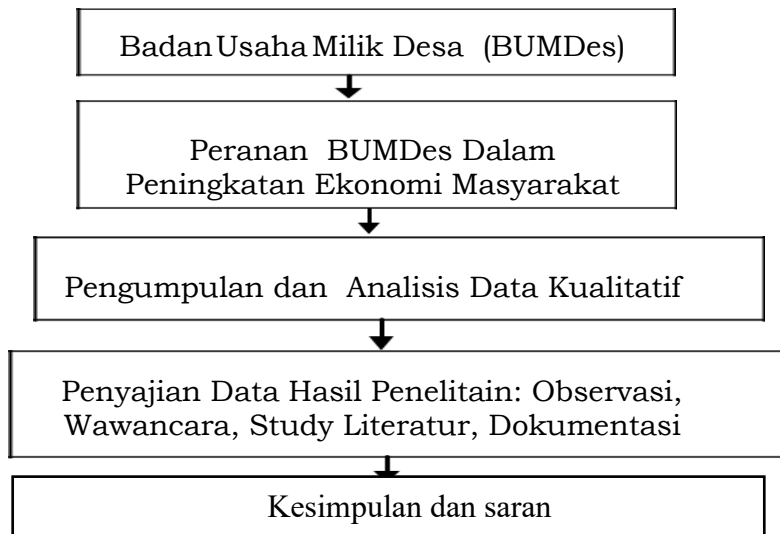
Dalam jurnal internasional, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Abaabil Alfirdausin dan Guntur Riyanto dengan judul *“The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)”* This study uses a mixed approach studies which associates qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach in this study will describe the stages of establishing BUMDes, strategies in managing BUMDes, and the benefits of

²¹ Afifa Rachmanda Filya, **“Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”**, JE &KP, Vol. 5. No. 1 Juni 2018, hal. 19-32

BUMDes on the welfare of the village community. While the quantitative approach will explain the role of BUMDes to increase Village Original Income (PADes). The results of the study showed that the establishment stage of the BUMDes was to recognize the potential of the Village, socialize to the community about BUMDes, create a drafting team, hold a MUSDES, and issue PERDES. The BUMDes strategy in managing its business can be seen from the SWOT factor owned by BUMDes. The benefits of the existence of BUMDes Tirta Mandiri to the community are the many programs offered by the Village to the community, reducing unemployment, and providing assistance to people who want to become entrepreneurs. While the results of quantitative analysis are the highest average sector of Village Original Income (PADes) from the results of the Village business or in this case BUMDes.²²

C. ALUR PROSES PENELITIAN

Alur Proses Penelitian.



²² Akhmad Abaabii Alfirdausin dan Guntur Riyanto, "The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)" *Journal Of Alppied Economics in Developing Countries*, Vol. 4. No. 2. 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah (Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Ormrodb 2005). Setiap metode penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofi penelitian yang dianut oleh sang peneliti. Metode penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh suatu gejala atau peristiwa atau kondisi pada suatu obyek penelitian yang disusun secara naratif.²³ Berikut pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli:

a. Menurut Maleong

Menurut Maleong, Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

b. Menurut Creswell

Menurut Creswell, *"qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes word, report*

²³ Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)h. 3

detailed views of information, and conducts the study in a natural setting". Penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural/sesuai fakta dilapangan.

c. Menurut Saryono

Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di gunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

d. Menurut Sugiyono

Sugiyono menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

e. Menurut Judith Preissle

"Qualitative research is a loosely clefined category of research designs or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio and videotapes and other written records and pictures or films." Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang terkotak-kotak dimana datanya berbentuk data verbal, visual, penciuman, sentuhan dan pencelupan yang disusun dalam bentuk narasi deskriptif.

f. Menurut Kirk & Niller

Dalam Nasution, 1988:23, Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.

g. Menurut Boghdan & Biklen

Menurut Boghdan & Biklen, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati (1975).

h. Menurut Strauss & Corbin

Menurut Strauss & Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur stistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.

i. Menurut David Williams

Menurut David Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami (1995).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantungpada pengamatan.

Di dalam karakteristik penelitian kualitatif juga terdapat banyak pendapat.

Menurut Moloeng, karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Latar alamiah
Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah. Hal ini dilakukan Karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Untuk itu peneliti melibatkan waktunya kesuatu tempat dalam penelitian.
2. Manusia sebagai alat (*instrument*)
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama, dengan demikian peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memahami keadaan di lapangan.
3. Metode kualitatif
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.
4. Analisis data secara induktif
Upaya pencarian data tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan.
5. Teori dari dasar (*Grounded Teory*)
Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Jadi, penyusunan teori ini bersal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan.
6. Deskriptif
Data yang dikumpulkan adalah berupa kara-kata, gambar, dan bukan angka- angka.
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
Penelitian kualitatif meghendaki adanya batas dalam

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal ini terjadi Karena batas fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal ini terjadi Karena batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus.

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas dan obyektivitas dalam fersi lain.
10. Desain bersifat sementara
Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengankenyataan dilapangan
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama
Penelitian kualitatif menghendaki agar hasil interpretatif yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh anusian yang menjadi sumber data.

Licoln dan Guba juga menjelaskan beberapa karakteristik penelitiankualitatif selain yang tersebut diatas, antara lain :

1. Metode kualitatif
2. Batas penelitian yang dinyatakan dengan fokus
3. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
4. Desain yang besifat sementara
5. Hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk menggali peran BUMDes dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.

B. Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang

diteliti. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Sumber Urip
- b. Ketua BUMDes Urip Jaya
- c. Ketua unit-unit usaha BUMDes
- d. Masyarakat Desa Sumber Urip

C. Data dan Sumber Data

Menurut Kippondof, data merupakan unit informasi yang direkan media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik dalam satu sisi. Di sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini berupa data dari hasil tes, wawancara, dan observasi serta dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Arikunto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.

Menurut Iofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.²⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 157

- a. Data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data Primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi ketika penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban BUMDes, profil BUMDes, data penduduk desa serta data-data lain yang terkait dengan BUMDes yang diperoleh dari dokumen laporan, buku, media publik dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer, dimana data primer adalah data utama yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian yaitu badan usaha milik desa Urip Jaya di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong . Kemudian data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber kedua dan ketiga. Data sekunder juga dikenal sebagai data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder meliputi gambar-gambar, dokumentasi penelitian pada pengurus bumdes. dan untuk melengkapi data yang dilakukan, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-

benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Margono, teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Arikunto, observasi adalah kegiatan penguatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Menurut Riyanto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu badan usaha milik desa, kemudian pelaku yang berperan pada bumdes yaitu pengelola badan usaha milik desa dengan. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan suatu pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data

dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.
2. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu juga sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan unsur pemerintahan desa Sumber Urip, pengurus BUMDes Urip Jaya, unit-unit usaha BUMDes Urip Jaya, dan masyarakat Desa Sumber Urip.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu pada saat melakukan penelitian. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan antara lain struktur Profil Desa Sumber Urip, data tingkat kesejahteraan masyarakat, data tingkat pengangguran, profil BUMDes, serta laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sedangkan dokumen eksternal yang digunakan antara lain media lokal. Selain itu juga peneliti melakukan pencarian (*searching*) berita-berita yang berkaitan dengan dampak BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat desa.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan temuan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena tanpa pengabsahan data di peroleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan temuan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan yang berbeda serta untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi sumber data yang telah dilakukan untuk menguji keabsahan temuan penelitian ini pada badan usaha milik desa yang dilakukan dengan cara yang mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu pengurus bumdes, masyarakat desa.

1. Triangulasi teknik telah dilakukan dengan melakukan observasi langsung setelah melakukan wawancara dari berbagai informan.
2. Triangulasi waktu telah dilakukan untuk pengecekan hasil wawancara, observasi sehingga peneliti melakukan wawancara sampai beberapa kali untuk 1 orang informan dalam waktu yang berbeda dan melakukan observasi dalam secara berkala.
3. Reduksi data telah dilakukan untuk menganalisis yang menajamkan dan mengarahkan, dan mengorganisasi.
4. Pengumpulan data telah dilakukan untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
5. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggambarkan situasi badan usaha milik desa Urip Jaya yang benar — benar diteliti. Maka dapat dideskripsikan bahwa peran bumdes sudah berjalan baik dalam upaya peningkatan ekonomi

masyarakat.

F. TEHNIK ANALISIS DATA

Menurut Patton, Analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Sedangkan menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan peran BUMDes Urip Jaya pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumber Urip.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, selanjutnya mengelompokkan (mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam

penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan peran BUMDes pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumber Urip..

3. Display Data

Setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Oleh karena itu, diharapkan setiap data bisa dipahami dan tidak terlepas dari latarnya. Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil simpulan atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab permasalahan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDes hingga tahap implementasi serta peran BUMDes pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Sumber Urip. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang ada diolah dan kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif.⁶⁸ Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Karena dalam penelitian ini

peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna. Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan peran BUMDes pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Sumber Urip.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Usaha Milik Desa Urip Jaya Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Pendirian BUMDesa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kata ideal BUMDesa yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat serta aksesnya terbuka untuk semua masyarakat

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi harapan besar muncul untuk menuju kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan masyarakatnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang mandiri.

BUMDesa adalah merupakan suatu lembaga yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama

lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

Ada lima manfaat berdirinya BUMDes:²⁵

- a. Manfaat Komersil. Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi .
- b. Pelayanan Publik. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Misalnya, BUMDes Tirta Mandiri memiliki Program Satu Rumah Satu Sarjana yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi di Desa Ponggok. Atau BUMDes Emha Desa Melirang, Kecamatan Bungah, dengan Pendirian Pesantren Ilmu Quran, penghafal Quran hingga menjadi hafiz secara gratis bagi masyarakat desa.
- c. Manfaat Ekonomi. BUMDes diharapkan mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Keuntungan yang didapat BUMDes dibagi pemerintah desa untuk disalurkan kembali kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan pembangunan desa.
- d. Manfaat Politik. BUMDes yang berdiri secara partisipatif, menjadi ruang bertemunya kelompok-kelompok kepentingan di desa. Kesepakatan-kesepakatan mengenai jenis usaha, persentase pembagian keuntungan, hingga terbitnya Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu manfaat tidak langsung dari keberadaan BUMDes.
- e. Manfaat Sosial Budaya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADes, maka BUMDes berkontribusi secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Tujuannya utamanya adalah mengurangi jumlah

²⁵ <https://www.desabisa.com/manfaat-keberadaan-bumdes-secara-umum/>

pengangguran yang ada di desa dan tidak terjadi urbanisasi untuk menjaga silaturahmi masyarakat. Tidak hanya itu, BUMDes juga akan memberikan warisan kepada generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan desa.

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

1. *Bisnis Sosial/ Serving*
Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
2. *Keuangan/ Banking*
BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.
3. *Bisnis Penyewaan/ Renting*
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
4. *Lembaga Perantara/ Brokering*
BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.
5. *Perdagangan/ Trading*
BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada

nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut

6. Usaha Bersama/*Holding*

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

7. Kontraktor/*Contracting*

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 khususnya pasal 19-25 berikut bidang- bidang usaha untuk BUMDesa adalah:

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial,
- 2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana disebut pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a) Air minum desa
 - b) Usaha listrik desa
 - c) Lumbung pangan
 - d) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- 3) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :

- a) Alat transportasi
 - b) Perkakas pesta
 - c) Gedung pertemuan
 - d) Rumah toko
 - e) Tanah milik BUMDes
 - f) Barang sewaan lainnya.
- 4) BUMDes dapat menjalankan bisnis perantara yang meliputi :
- a) Jasa pembayaran listrik
 - b) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
 - c) Jasa pelayanan lainnya.
- 5) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang barang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 6) Unit usaha dalam BUMDesa dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi :
- a) Pabrik es
 - b) Pabrik asap cair
 - c) Hasil pertanian
 - d) Sarana produksi pertanian
 - e) Sumur bekas tambang
 - f) Kegiatan bisnis produktif lainnya.
- 7) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- 8) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*Holding*) sebagai induk dari unit unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :
- a) Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
 - b) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat. Dan masih banyak lagi kegiatan yang produktif lainnya yang bisa dijalankan di BUMDes.

Cakupan bidang usaha yang cukup luas ini harus ditujukan untuk kesejahteraan desa sesuai dengan tujuan dan pengertian Badan Usaha Milik Desa yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Sumber Urip adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan mayoritas penduduknya adalah petani. Desa Sumber Urip memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai kegotongroyongan hal ini lah yang mendasari berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang diberi nama Urip Jaya, berdiri sejak tahun 2015 dan mendapatkan amanah sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga desa dan dapat mengembangkan potensi desa dan potensi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan BUMDes. Tujuan didirikan BUMDes Urip Jaya seiring dengan tujuan BUMDes yang tertuang dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam BUMDes Urip Jaya upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa dan pedesaan dengan meningkatkan kapitalisme masyarakat dalam

merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa merupakan tujuan utama dengan sasarannya adalah terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan potensi desa yang ada. Kegiatan usaha BUMDes Urip Jaya adalah mengelolah unit *Payment Point Online Bank* (PPOB) sebagai pusat akses pembayaran listrik dan air, unit bokashi sebagai pusat layanan persediaan pupuk dan unit wisata sebagai pusat kelola potensi desa wisata dan ada juga unit tenda yang menyediakan berbagai macam tenda untuk acara hajatan warga dan unit air bersih.

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh dari beberapa sumber informan diantaranya adalah kepala desa Sumber Urip, Kepala BUMDes, Kepala Unit Usaha dan beberapa masyarakat desa bahwa kegiatan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Urip Jaya memberikan dampak yang positif dan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli desa, pendapatan BUMDes itu sendiri maupun pendapatan masyarakat desa. Berikut diantara kegiatan unit usaha desanya adalah:

a) Unit *Payment Point Online Bank* (PPOB)

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah suatu usaha jasa/ layanan secara online system dimana perbankan ditunjuk sebagai fasilitator oleh sebuah perusahaan provider sebagai tempat pembayaran tagihan bagi pelanggannya. BUMDes Urip Jaya bekerja sama dengan Bank memberikan fasilitas PPOB dalam rangka membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan PLN, Pulsa HP, BPJS dan sebagainya. Dengan adanya unit *Payment Point Online Bank* (PPOB) tentunya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa diantaranya adalah memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri dan juga keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan, semakin banyak BUMDes melayani loket pembayaran bagi masyarakat maka semakin banyak juga keuntungan yang diperolehnya.

- b) Unit Bokashi
Masyarakat Desa Sumber Urip yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi BUMDes untuk mengelola pupuk bokashi. Pupuk bokashi adalah pupuk organik yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang. Hingga saat ini unit bokashi BUMDes Urip Jaya masih menjadi pusat pelayanan pupuk bokashi bagi masyarakat desa sumber urip dan ini tentunya memberikan kontribusi pada pendapatan BUMDes.
- c) Unit Tenda
BUMDes Urip Jaya menyediakan layanan jasa sewa tenda bagi masyarakat yang membutuhkan ketika ada acara hajatan atau acara lainnya. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi lebih mudah yang sebelumnya menyewa tenda dari desa lain dan hampir setiap bulan disepanjang tahun banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa sewa tenda dari BUMDes terkadang juga sampai antri. Unit tenda ini juga merupakan salah satu unit kegiatan BUMDes yang banyak memberikan manfaat secara ekonomi juga secara sosial. Secara ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan BUMDes dan secara sosial dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkena musibah misalnya musibah kematian.
- d) Unit Wisata
Unit wisata sebagai pusat kelola potensi desa wisata. Unit wisata merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh BUMDes Urip jaya yang memberikan kontribusi paling besar pada BUMDes yaitu penyumbang pendapatan terbesar dari seluruh unit sebesar 70 %. Dalam unit wisata, ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pengelolaan sektor wisata taman wisata alam bukit kaba, pembuatan souvenir tentang wisata alam bukit kaba dan pengeloaan *homestay*. Dengan adanya beberapa kegiatan yang ada pada unit wisata ini, BUMDes Urip Jaya memberdayakan pemuda desa sebagai anggota BUMDes sehingga

selain mendapatkan penghasilan dari bertani juga mendapatkan penghasilan sebagai anggota BUMDes dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Selain itu juga para pemuda khususnya dan masyarakat desa pada umumnya bisa mendapatkan tambahan dari penjualan souvenir. Taman Wisata Alam Bukit Kaba merupakan potensi wisata Desa Sumber Urip yang semakin hari semakin meningkat pengunjungnya. Sebelum Pandemi Covid-19 pendapatan BUMDes dari unit wisata bisa mencapai Rp. 15 Juta/bulan dengan rata-rata pengunjung sebanyak 3000 wisatawan per bulannya. Untuk kegiatan *Homestay*, BUMDes berkerjasama dengan masyarakat desa sumber urip yangarganya bersedia rumahnya dijadikan sebagai tempat *Homestay*. Bagi para wisatawan yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bukit Kaba dapat menginap diperumahan warga yang telah ditunjuk oleh BUMDes. Bukan hanya para wisatawan yang menginap tapi seringkali para tamu dari wilayah lain yang sedang ada kepentingan atau pekerjaan disekitar wilayah Desa Sumber Urip. Dari kegiatan *homestay* yang dikelola BUMDes ini, bukan hanya BUMDes yang mendapatkan pendapatan tapi masyarakat desa setempat yang rumahnya dijadikan sebagai *homestay* juga mendapatkan penghasilan tambahan. Selain BUMDes dan masyarakat desa, unsur pemerintah dalam hal ini adalah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bengkulu juga mendapatkan kemanfaatan dari pengelolaan unit wisata Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang dikelola oleh BUMDes Urip Jaya. Hal ini disampaikan oleh kepala desa maupun ketua BUMDes bahwa target PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) BKSDA Provinsi Bengkulu yang targetnya adalah Rp. 100Juta itu sudah terpenuhi hanya dari unit wisata Taman Wisata Alam Bukit Kaba..

Dari kajian diatas, BUMDes Urip Jaya sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat desa Sumber Urip dan juga memberikan banyak manfaat bagi para *stakeholder*. Hal ini selaras dengan tujuan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Bab II Pasal 3. antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Mengembangkan usaha masyarakat
- 4) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, dan
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes Urip Jaya dalam kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes Urip Jaya juga melaksanakan 2 peran sekaligus yaitu peran ekonomi dan juga peran sosial. Peran sosialnya diantaranya adalah dari sebagian pendapatan BUMDes digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah seperti kematian, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang sakit dan juga Yatim Piatu.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes.

BUMDes dalam melaksanakan perannya untuk mencapai tujuan yang efektif, ada berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung
 - a. Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi dibangun dari interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau dan mampu melibatkan diri untuk bersosialisasi dengan individu lainnya. Dalam strategi pengembangan BUMDes yang baik, tidak hanya menyangkutkan pengurus BUMDes saja tetapi juga ada hubungan dengan masyarakat. Masyarakat

dapat berpartisipasi dan memberikan kritik atau sarannya kepada pengurus BUMDes. Dengan begitu pengurus pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan masyarakat, atau terkait masalah dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kritik dan saran atau berbagai pendapat yang ditampung oleh pengurus lalu disampaikan pada saat rapat. Hal inilah yang nantinya akan membawa pengurus BUMDes pada sebuah perubahan, dimana akan dilakukan perbaikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan pembenahan. Dari adanya partisipasi masyarakat yang berupa penyampaian kritik/saran juga termasuk pada tindakan proaktif.

b. *Education and Training Activities* dalam Kegiatan Pengembangan BUMDes

Sebuah organisasi sangat memerlukan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. *Education and Training Activities* merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain.

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di BUMDes, pendidikan dan pelatihan tidak hanya diutamakan kepada Ketua BUMDes, tetapi juga untuk pengurus BUMDes lainnya. Selain itu pendampingan oleh para konsultan yang berkompeten juga dibutuhkan saat awal BUMDes didirikan. Proses pendampingan disini digambarkan sebagai bentuk pendidikan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes diajarkan berbagai cara pengelolaan BUMDes yang baik dan benar sesuai dengan aturan dasar BUMDes. Selain itu juga ada pendampingan mengenai aplikasi program, yang berguna untuk pengerjaan laporan tahunan.

c. Sosialisasi untuk Masyarakat

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai BUMDes dan berbagai

kegiatan yang ada di dalamnya. Sosialisasi dapat diberikan pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUMDes saja tetapi juga pada saat BUMDes telah berjalan. Hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

d. *Team Building* yang Solid

Team building sangatlah penting dalam sebuah proses pengembangan organisasi. *Team building* merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Strategi dalam pembentukan tim ini dirasa sangat diperlukan karena tim inilah yang nantinya akan menjalankan semua urusan atau pengelolaan organisasi, sehingga setiap pengurus harus memiliki kompetensi dalam dirinya. Dalam strategi pembentukan tim yang ada di BUMDes, alangkah lebih baik jika lebih mementingkan pembentukan yang seluruh pemilihannya diserahkan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan BUMDes ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat, sehingga semua keputusan juga dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, proses pemilihan pengurus yang dilakukan oleh masyarakat harus didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki kandidat, dimana setiap pengurus harus berkompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung yang bisa mempengaruhi perkembangan BUMDes dalam mencapai tujuan yang efektif, ada beberapa faktor

penghambat yang dapat mempengaruhinya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kerancuan Posisi BUMDes sebagai Institusi Sosial dan Komersial

Keleluasaan jenis usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes terlihat jelas di Undang-Undang Tentang BUMDes Nomor 6 Tahun 2014. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Pemahaman terhadap BUMDes yang harus menghasilkan profit akan mengarahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan institusi komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

- b. Rendahnya Inisiatif Internal Masyarakat dalam Menggerakkan Ekonomi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksikan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self-governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Desa juga tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa, namun meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Konstruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha

Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam studi ditemukan insiatif pembentukan lebih banyak muncul dari pihak luar desa. Walaupun ada juga inisiatif yang hadir dari internal desa (pemerintah desa dan masyarakat), namun masih minim. Menjadi penting dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlampauinya target pembentukan BUMDes harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

c. Kebijakan yang Belum Mengarahkan Profesionalisme BUMDes

Struktur pengelolaan BUMDes masih banyak yang belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Hasil itu dapat dilihat dengan masih ada pengelola operasional BUMDes yang dijabat oleh aparatur Pemerintahan Desa. Selain itu, tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas

BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa. Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes. Kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang professional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari hal tersebut, dipandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes, sehingga akan memperkuat pengelolaan BUMDes secara umum. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes Masih Kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai yang bisa mengakibatkan adanya isu BUMDes yang hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

e. Kepemimpinan dan Manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah Desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUMDes. BUMDes merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat. Namun, jika suatu BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kemampuan para direksi BUMDes. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Akibatnya, BUMDes tidak melaju cepat dan hanya jalan di tempat.

f. Konsep Pembangunan Desa yang Keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat

secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk dengan judul *“Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat”*, bahwa Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada perdesaan kawasan pertambangan emas memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

Penelitian ini yang dilakukan oleh Syahrul Efendi yang menganalisis tentang Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menyatakana bahwa : 1) Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Rajadesa belum dilaksanakan degan baik, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Rajadesa tidak melakukan strategi yang tepat dalam mengembangkan BUMDes Desa Rajadesa dalam hal pengembangan potensi sumberdaya alam, kemampuan internal organisasi, dan anggaran yang tidak sesuai. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti BUMDes belum diberikan kewenangan dalam

mengelola potensi eko wisata Shamida, Keterbatasan anggaran BUMDes, Tidak adanya evaluasi kinerja, Kurangnya kemampuan manajemen. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu Pemerintah Desa Rajadesa sudah menyerahkan program pembuatan bumi perkemahan di bukit Shamida yang sedang melakukan proses pembenahan lahan, penetapan anggaran yang diberikan dalam musyawarah Desa Rajadesa dan melakukan pengajuan anggaran ke instansi pemerintah lainnya.

Dalam menjalankan perannya tentunya BUMDes Urip Jaya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang bisa mempengaruhi BUMDes dalam mencapai tujuannya. Diantara faktor pendukungnya adalah:

1) Komitmen Pemerintah

Peran BUMDes Urip jaya dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif dan terarah. Komitmen pemerintah pusat terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Hal ini terlihat dari adanya suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sangat mendukung peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa. Selain program BUMDes pemerintah daerah juga melaksanakan program-program lain yang berbasis pada masyarakat desa. Dari hasil kajian selama penelitian bahwa BUMDes Urip Jaya dalam menjalankan perannya mendapatkan dukungan yang begitu besar dari pemerintah daerah terutama

pemerintah desa Sumber Urip dan juga masyarakat yang bisa dan mampu untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit usaha BUMDes dan pencapaian tujuan BUMDes.

2) Tersedianya Potensi Sumberdaya Alam

Salah satu aset Desa Sumber Urip yang dikelola oleh BUMDes Urip jaya adalah sumber daya alam Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam mencapai tujuan secara efektif, BUMDes Urip Jaya menghadapi beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan beberapa program BUMDes tidak

terlaksana. Diantaranya adalah:

1. Faktor Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu unsur yang sangat penting untuk hidup dan berkembang. Dari hasil kajian dengan pengurus BUMDes Urip jaya , menyatakan bahwa pendanaan untuk BUMDes masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengembangan untuk program-program BUMDes kedepannya.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Dari hasil kajian dari narasumber menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendalanya masih rendah Sumber Daya Manusia terutama pengelola BUMDes itu sendiri. Sampai saat ini belum adanya pelatihan-pelatihan yang mendukung program BUMDes baik itu dari BUMDes sendiri maupun dari pihak-pihak yang terkait. Selama ini BUMDes Urip Jaya masih otodidak dalam melaksanakan program dan kegiatan usahanya, sehingga banyak program-program yang belum terlaksana terkendala pada tingkatan SDM nya.

3. Terbatasnya Dukungan Swasta

Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua *stakeholder* di desa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan

perekonomian desa (Mustanir,Yasin, Irwan, & Rusdi, 2018)

Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUMDes akan dapat menumbuhkembangkan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan kajian dari narasumber bahwa semetara ini pelaksanaan program BUMDes dengan sumber pendanaan berasal dari pemerintah semata. Belum ada pihak swasta yang menginvestasikan dananya pada program- program BUMDes. Hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program BUMDes berkelanjutan.

BAB

V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam kajian diatas dapat disimpulkan bahwa Peran BUMDes Urip Jaya dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa Sumber Urip secara umum sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berjalannya kegiatan-kegiatan unit usaha BUMDes. BUMDes Urip Jaya dalam menjalankan perannya juga sudah memberikan kontribusi yang cukup besar baik peran ekonomi maupun peran sosial. Peran ekonomi yang sudah dilakukan oleh BUMDes terlihat dari kegiatan unit usahanya yang selain memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat juga BUMDes memberdayakan warga terutama pemuda desa. Selain masyarakat, unsur pemerintah juga merasakan manfaat yang cukup besar terutama pada unit wisata Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Dari peran sosial yang BUMDes Urip Jaya lakukan diantaranya adalah dari sebagian pendapatan BUMDes digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah seperti kematian, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang sakit dan juga Yatim Piatu.

BUMDes Urip Jaya dalam menjalankan perannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu dukungan yang begitu besar dari pemerintah desa dan juga masyarakat Sumber Urip yang bisa dan mampu untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan unit usaha BUMDes. Selain itu BUMDes Urip Jaya memiliki prospek yang sangat bagus karena Desa Sumber Urip memiliki aset yang bisa dikelola yaitu dari sumber daya alam Taman Wisata Alam Bukit Kaba sedangkan faktor kendalanya adalah dari faktor sumber daya manusia yang masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan. Hal ini disampaikan oleh kepala desa yang senada dengan penyampaian ketua BUMDesnya bahwa dari awal pendirian pengelolaan BUMDes, mereka belum

mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pihak yang terkait.

B. SARAN

Pemerintah Desa Sumber Urip dalam perannya sebagai fungsi pendampingan dalam upaya peningkatan kapasitas usaha masyarakat desa ke depannya lebih memaksimalkan setiap unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes Urip Jaya dalam rangka meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki agar dapat mendorong investasi masuk ke Desa Sumber Urip. Selain itu baik pemerintah desa maupun ketua BUMDesnya agar terus mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terutama untuk pengurus dan anggota BUMDes Urip Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Rachmanda Filya, “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”, JE &KP, Vol. 5. No. 1 Juni 2018, hal. 19-32
- Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). h. 56-63
- Akhmad Abaabiil Alfirdausin dan Guntur Riyanto, “The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)” *Journal Of Alppied Economics in Developing Countries*, Vol. 4. No. 2. 2019
- Alfan, Syukran dan Tauran. 2015. “Dampak Kegiatan Badan Usaha Milik Desa(BumDes) Bagi Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”.
<http://ejournal.unesa.ac.id/article/18717/42/article.pdf>.
- Apris Ara Tilome, Dkk, *Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Satria Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi (JPPE), Vol. 3.No.2, 2020.
- Coristya, Heru dan Suwondo. ”Keberadaan BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076
- Dewi Kirowati, dkk, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Desa”, AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), Vol. 1, Edisi 1, 2018, h. 15.

Elma Lazuardiah, Dkk, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.* <http://journal.febubhara-sby.org/bharanomic> Vol.1 No. 1 tahun 2020
<http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.Ringkasan.pdf>.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
<https://www.neliti.com/id/publications/110259/peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-dalam-peningkatan-ekonomi-masyarakat>.

Hermen Malik, *Bangun Industri Desa Selamatkan Bangsa*, IPB Press, Bogor, 2015.

Ibrahim dkk, “*Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat*”, *Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 21, No. 3, November 2019.

I Kadek Darwita, dkk, “*Peranan BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*” *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 9, No.1, Tahun 2018, h. 53.

Jhiang, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142

Lexy Moeloeng. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moleong. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maria Rosa Ratna, “ *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta*”, MODUS, Vol.28, 2016, h. 155.

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*, Jurnal Riset Akuntansi (Juara), Vol. 9 No. 2, 2019.

Nurdiyanti R, dkk, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur*, Elastisitas, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 3. No. 1, Maret 2021

Permendes No. 4 Tahun 2015. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
<http://www.keuangandes.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/>

Raudhatul Firdaus, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*, JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), Vol. 1 No. 7 Desember 2020 .

Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2012), h. 113

Samadi, ArrafiqurRahman, Afrizal. 2013. “*Peranan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*”.
<http://ejournal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384>.

Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), h.16

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Albeta.

Syahrul Efendi. 2019. “Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 4, Desember 2019.

Tama Dantika Ovi Era and Yanuardi. 2015. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa..

Versanudin Hekmatyar, Fentiny Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro*, Sosio Konsepsia, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7. No 2 2018

Vincentyus Jyestha, “Bumdes Sebagai Akselator Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Warga Desa Sumber Urip”, *Tribunnews.com*. (Kamis, 25 Oktober 2018).

<https://www.desabisa.com/manfaat-keberadaan-bumdes-secara-umum/>

www.kompas.com